

ANALISIS PENGARUH PAJAK EKSPOR TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING CPO DI INDONESIA

Rianto Nurcahyo
Binus Business School, Bina Nusantara University, Jakarta
Jalan Kebon Jeruk Raya No.27
rnurtjahjo@binus.edu

Abstract

The agricultural sector is one of the economic sources of Indonesian society, especially Crude Palm Oil (CPO). Indonesia is the largest producer of CPO in the world supported by the land area in the country. According to some parties, Indonesian CPO's export levy policy is still considered ineffective. The government raised export levies as one of the government's policy instruments in reducing the rise in cooking oil prices and government programs in subsidizing bio-diesel. This study aims to identify the existing problems ranging from aspects of CPO production and exports, factors affecting the area, productivity, and export of CPO and also evaluating the influence of export taxes and levies toward sales decisions. Data processing is done qualitatively. The amount of data obtained from the primary data was acquired from interviews with respondents residing in the CPO industry in Indonesia.

Keyword : *cpo, export tax, indonesia*

Abstrak

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi masyarakat Indonesia, terutama Crude Palm Oil (CPO). Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia yang didukung oleh luas lahan di Tanah Air. Menurut beberapa pihak, kebijakan pungutan ekspor CPO Indonesia masih dinilai tidak efektif. Pemerintah menaikkan pungutan ekspor sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengurangi kenaikan harga minyak goreng dan program pemerintah dalam mensubsidi biodiesel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada mulai dari aspek produksi dan ekspor CPO, faktor-faktor yang mempengaruhi luas, produktivitas, dan ekspor CPO dan juga mengevaluasi pengaruh pajak ekspor dan retribusi terhadap keputusan penjualan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Jumlah data yang diperoleh dari data primer diperoleh dari wawancara dengan responden yang berada di industri CPO di Indonesia.

Kata kunci: *cpo, pajak ekspor, indonesia*

Pendahuluan

Tanaman kelapa sawit yang memiliki keunggulan sangat besar ini memiliki cerita yang panjang dalam perkembangannya di Indonesia. Lubis (2008) Tanaman kelapa sawit atau yang memiliki nama latin (*Elaeis guineensis*) berasal dari Afrika Barat yang merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848. Awalnya tanaman kelapa sawit dibudidayakan sebagai tanaman hias, sedangkan pembudidayaan tanaman untuk tujuan komersial baru dimulai pada tahun 1911. Perintis awal usaha perkebunan

kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet, kemudian budidaya kelapa sawit diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Indonesia. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit maju sangat pesat sampai bisa menggeser dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu.

Kelapa sawit mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya (seperti kacang kedelai, kacang tanah dan lain-lain), sehingga harga produksi menjadi lebih ringan. Masa produksi

kelapa sawit yang cukup panjang sekitar dua puluh dua tahun juga akan turut mempengaruhi ringannya biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan tanaman yang paling tahan hama dan penyakit dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Jika dilihat dari konsumsi per kapita minyak nabati dunia mencapai angka rata-rata 25,32 kg / th setiap orangnya, kebutuhan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi per kapita. Dalam Sejarah sawit Indonesia tercatat bahwa sampai pertengahan tahun 1970 an minyak kelapa merupakan pemasok utama dalam kebutuhan minyak nabati dalam negeri, baik minyak goreng maupun industri pangan lainnya lebih banyak menggunakan minyak kelapa dari pada minyak sawit.

Peersis, Syafrial, dan Nuhfi (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor CPO di Indonesia sangat banyak dan semuanya saling berhubungan dari Upstream sampai ke Downstream dalam kinerja ekspor CPO dan mempengaruhi kebijakan pajak ekspor terhadap perilaku ekspor komoditi CPO, produksi, serta konsumsi minyak goreng di Indonesia

Krugman, Obstfeld, Melitz (2015), wawasan yang paling penting dalam semua ekonomi internasional adalah bahwa ada keuntungan dari perdagangan, yaitu ketika negara menjual barang dan jasa satu sama lain pertukaran ini hampir selalu saling menguntungkan mereka. Dengan adanya kebutuhan CPO ini pasar internasional maka akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan memberikan kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia untuk menjaga kestabilan harga serta pemanfaatan keuntungan tersebut untuk membangun industri kelapa sawit dan dalam rangka mendukung produsen-produsen kelapa sawit di Indonesia maupun mendukung program pemerintah. Kebijakan itu diantaranya penetapan pajak ekspor CPO dan *levy* dimana kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi kondisi pasar komoditas minyak kelapa sawit secara umum.

Metode Penelitian

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu

dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik Gunawan (2013). Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.

Studi Literatur (*Library Research*)

Penulis berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, dan peraturan perundang - undangan dan lain-lain) untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Melalui *library research* akan diperoleh data sekunder.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik analisis data yang dibuat, peneliti melakukan analisis dengan mengkoordinasikan data yang diperoleh ke dalam suatu pola, kategori, satuan uraian dasar. Pola, kategori dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Data kualitatif dapat diperoleh dari catatan, transkrip, wawancara melalui rekaman suara, internet, artikel, jurnal, dan lainnya Sekaran, Bougie (2013). Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian.

Penelitian kualitatif harus berdasarkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangatlah penting. Melalui keabsahan data

kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2007). Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:29). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena ada suatu perubahan dalam penetapan pada pajak ekspor dan pemberlakuan *levy* oleh pemerintah. Kebijakan ini baru diubah dan dicanangkan oleh pemerintah untuk penetapan *levy* pada tahun 2015, perubahan dan penetapan ini menjadi suatu bahasan topik yang menarik untuk dibahas.

Atas dasar fenomena tersebut, peneliti merumuskan pokok permasalahan, lalu membuat sistematika penulisan supaya penelitian ini lebih terarah. Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara mendalam dan studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Perusahaan kelapa sawit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri yang memperjualbelikan *CPO* baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari keputusan komersil yang ditentukan oleh perusahaan kelapa sawit ini baik dalam keputusannya untuk menjual *CPO* ini secara lokal maupun melakukan ekspor ke luar negeri, Perusahaan kelapa sawit melihat berbagai macam Hal yang tidak lepas dari berbagai macam-macam faktor yang menjadi pertimbangan sendiri dari para pimpinan-pimpinan yang berada di perusahaan kelapa sawit. Salah satunya adalah kebijakan

perdagangan yang ditetapkan pemerintah sangat mempengaruhi keberlangsungan transaksi yang mencakup barang ekspor dan impor, kebijakan tersebut salah satunya meliputi kebijakan ekspor maupun kebijakan impor yang bertujuan untuk melindungi produsen di dalam negeri dan menjaga kestabilan harga di dalam negeri maupun internasional. Hal ini sesuai dengan teori menurut Mankiw (2003), bahwa kebijakan perdagangan yang didefinisikan secara luas merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi secara langsung jumlah barang dan jasa yang diekspor maupun barang dan jasa yang diimpor. Secara umum kebijakan perdagangan terbentuk untuk melindungi industri domestik dari pesaing asing, baik dengan memberlakukan pajak impor (tarif) terhadap suatu barang tertentu atau membatasi jumlah barang dan jasa yang diimpor (kuota).

Kebijakan ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik dan pemerintah. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Edwards III (Maryati, 2013) bahwa kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Hal serupa juga sesuai yang disampaikan oleh Howlett dan Ramesh (Maryati, 2013) adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*). Senada dengan definisi ini, Hal ini merupakan perwujudan dari intervensi pemerintah yang memanfaatkan segala instrumen yang ada dalam usahanya untuk mengatasi persoalan publik. Edwards III dan Sharkansky (Maryati, 2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan".

Selain itu Perusahaan kelapa sawit juga mempertimbangkan berbagai macam formulasi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah mulai dari pungutan PPN, *export duty*, *levy* dan formulasi kebijakan lainnya. Formulasi kebijakan ini sangat penting karena setiap

kebijakan yang ditentukan mempengaruhi segala aspek didalamnya. Hal ini sesuai dengan teori menurut (Solichin, 2012) yang menyatakan bahwa, Formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh *policy maker* sebelum kebijakan tersebut dibuat dan dikeluarkan. Hal serupa juga terdapat di dalam teori (Dunn, 2012) yang menyatakan bahwa Hal ini penting karena setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah akan menimbulkan dampak bagi masyarakat serta kemajuan pembangunan nasional. Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang rasional harus memiliki cara yang jelas dan memiliki sifat yang logis serta deskriptif dalam menilai berbagai pilihan alternatif kebijakan.

Selain dari sisi kebijakan pemerintah, Perusahaan kelapa sawit melihat berbagai macam manajemen ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat dua kebijakan yang mempengaruhi manajemen ekonomi suatu negara yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi perekonomian mengenai kondisi kebijakan dalam hal permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan teori Menurut Haryadi (2014) kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Sulistyanto (Awkuyen, 2011) "*Factors Affecting the Performance of Indonesia's Crude Palm Oil Export*" yang menyatakan *the challenges in the world CPO market, such as self sufficient policy in developing countries, establishment of trade standard and quality, non-tariff barrier, and exchange rate effects.*"

Selain dari sisi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, Perusahaan kelapa sawit melihat berbagai macam faktor yang mempengaruhi faktor-faktor harga industri kelapa sawit yang pertama yaitu keadaan *Supply* dan *Demand Market* terhadap CPO ini. Permintaan dan penawaran dari hasil produk CPO ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi permintaan dan penawaran tidak lepas dari kebijakan harga

yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dari produksi CPO ini secara lokal maupun yang akan diekspor nantinya terutama dalam penetapan kebijakan fiskal.

Hal serupa juga ditambahkan teori menurut Kismono (2001), ia mendefinisikan harga sebagai nilai tukar suatu produk yang dinyatakan dalam suatu moneter. Kenaikan harga merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dari proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini ketidakseimbangan sering terjadi dalam permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang diperlukan untuk menguasai kestabilan harga pada tingkat tertentu. Hal ini juga sesuai dengan teori Kindleberger dan Lindert (Nurdin, 2008) yang menyatakan bahwa, secara teoritis besarnya volume ekspor dari suatu negara merupakan selisih antara penawaran dan permintaan kebutuhan domestik (*excess demand*) bagi negara konsumen / negara pengimpor. Sehingga permintaan dan penawaran merupakan faktor utama pemerintah dalam melihat value dari industri sawit ini yang nantinya akan dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan fungsi utama yaitu membangun program pemerintah untuk membuat negara semakin maju dan berkembang dan menjadi pesaing yang handal dalam industri internasional.

Pada faktor yang kedua yaitu persaingan harga minyak nabati baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Perusahaan sawit melihat persaingan di industri ini masih dalam keadaan yang dalam arti kata yaitu "cukup sehat" dimana para kompetitor baik di dalam negeri maupun kompetitor asing masih pada porsi atau bagian masing-masing dalam mencari pangsa pasar di industri CPO ini. Negara Malaysia merupakan kompetitor Indonesia dalam persaingan industri di CPO ini hal ini juga disampaikan peneliti Talib and Darawi (2002), "*Malaysia CPO influenced by palnted area, domestic consumption, export, and import, CPO stock and price, production technology, and soybean oil price*" dimana faktor-faktor diatas juga berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan industri CPO di Indonesia.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi harga CPO yakni keadaan cuaca. Indonesia

dan Malaysia merupakan negara yang keunggulan dari segi geografis untuk menanam pohon kelapa sawit karena dua negara ini terutama Indonesia berada di garis khatulistiwa dimana yang kita ketahui tanaman kelapa sawit sangat bagus dan produktif dengan kondisi cuaca ini. Namun pada tahun 2016 Indonesia mengalami kondisi cuaca yang cukup buruk yaitu kondisi el nino yang berkepanjangan sehingga pasokan *CPO* dalam negeri sangat kurang dan ini mempengaruhi harga dari *CPO* yang nantinya akan mempengaruhi keputusan penjualan dari perusahaan kelapa sawit dalam mengkondisikan penjualan di harga yang terbaik di pasar.

Faktor selanjutnya yaitu perubahan peraturan kebijakan pemerintah Indonesia khususnya dalam penetapan pajak ekspor dan levy. Konsep pajak secara umum dikemukakan oleh teori (Salvatore, 2007) yang menyatakan bahwa, Suatu negara dalam mencukupi kebutuhannya di dalam negeri memiliki beberapa hambatan dimana barang tersebut tidak bisa diproduksi sendiri melainkan harus diimpor dari negara lain, sebaliknya ketika dunia luar membutuhkan produk dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan domestik maka negara yang memiliki produk dalam kapasitas tertentu yang lebih banyak akan melakukan ekspor. Pada tahun 2015 pemerintah memperbaharui peraturan tentang pajak ekspor dan pungutan ini yang terdapat Pada pertengahan tahun 2015 pemerintah merevisi kebijakan dimana diberlakukannya pungutan tetap pada kegiatan ekspor *CPO* dimana peraturan tersebut dibentuk berdasarkan PMK 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan Pungutan yang ditetapkan sebesar 50 dollar per metrik ton ditetapkan untuk ekspor minyak sawit mentah dan pungutan sebesar 30 dollar per metrik ton ditetapkan untuk ekspor produk minyak sawit olahan. Pungutan ini bersifat permanent tanpa melihat kondisi harga *CPO* di pasar walaupun ketika harga *CPO* melewati batasan 750 dollar AS per ton, maka ketetapan ini tetap berlaku dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri dalam membantu para produsen-produsen penghasil *CPO* selain itu pemerintah

juga memiliki program lainnya yaitu program biodeisel dimana program ini bertujuan untuk mencapai target B20 yang sudah tercapai pada tahun 2016. kebijakan ini diprioritaskan oleh pemerintah untuk mengurangi impor minyak bahan bakar mentah yang konsumsinya sangat besar di dalam negeri, dengan adanya program ini pemerintah dapat menghemat impor bahan bakar dan dapat dimanfaatkan atau dialokasikan untuk kebutuhan lainnya di dalam negeri, selain itu *CPO* ini juga digunakan pemerintah sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik.

Selain itu dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat suatu badan regulasi yang mempengaruhi atau menjaga kestabilan harga *CPO* di Indonesia masih kurang adanya dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia yang memiliki body government seperti *MPOB*, *MPOA* yang dapat memberikan informasi dan menjaga regulasi dan menjaga kestabilan *CPO* di Malaysia. Walaupun di Indonesia sudah memiliki *GAPKI* namun cukup dirasakan oleh produsen-produsen *CPO* di Indonesia kurang cukup. Body government sangat penting keberadaannya dalam mendukung dan menjaga kestabilan harga. Murray, Holloway, dan Hunt (Schmitthoff, 2012) mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai:

"...the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nation."

Dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi harga *CPO* baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini mempengaruhi kondisi pasar komoditas sawit secara umum, di jaman modern kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri dalam hal mendukung industri kelapa sawit dalam ranca global seperti trading kelapa sawit yang sudah modern saat ini dimana komoditas ini diperjualbelikan secara real time dan secara global di bursa komoditas indonesia mengingat Perusahaan kelapa sawit juga merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam transaksi trading di bursa komoditas ini. Perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang merupakan salah satu cara dalam mengkombinasikan faktor produksi. Sementara itu, faktor produktivitas dimaksudkan sebagai suatu ukuran dari efisiensi yang berupa rasio produk terhadap faktor - faktor produksi

tertentu. Inovasi dan perubahan teknologi secara garis besar mampu meningkatkan tingkat produksi sekaligus produktivitasnya.

Dari berbagai macam faktor-faktor diatas menentukan pimpinan perusahaan kelapa sawit dalam keputusan komersil yang diambil, dari hasil penelitian peneliti pada tahun 2016 Perusahaan kelapa sawit lebih fokus untuk menjual secara lokal dengan salah satu faktor nya yakni keadaan cuaca el-nino yang berkepanjangan sehingga kebutuhan CPO di dalam negeri sangat besar dan menuntun produsen ke harga jual yang lebih baik di dalam industri ini sehingga profit yang didapat lebih besar dibandingkan melakukan ekspor ke luar negeri pada tahun ini mengingat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah seperti export duty, Levy, PPN yang dikenakan kepada produsen-produsen kelapa sawit, namun Perusahaan kelapa sawit tetap melakukan ekspor untuk menjaga relasi dengan customer di luar negeri.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan komersil Perusahaan kelapa sawit dalam menentukan keputusan penjualan yang diambil terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu pengenaan pajak ekspor dan levy sehingga menyimpulkan keputusan perusahaan untuk melakukan penjualan CPO di dalam negeri maupun di ekspor ke luar negeri.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, maka simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan Perusahaan kelapa sawit diantaranya kondisi Permintaan dan penawaran di dalam negeri maupun luar negeri, persaingan harga minyak nabati baik di dalam negeri dan luar negeri, keadaan cuaca, dan perubahan regulasi pemerintah terutama dalam pajak ekspor dan levy. Penetapan kebijakan pemerintah dalam pajak ekspor dan levy sangat mempengaruhi keputusan komersil yang diambil oleh perusahaan kelapa sawit karena hal tersebut mempengaruhi profit dari perusahaan dengan adanya kebijakan tersebut perusahaan lebih melihat ke harga yang pasar yang lebih baik dalam penjualan CPO ini.

Dengan adanya penetapan pajak ekspor dan levy, pada tahun 2016 Perusahaan kelapa sawit lebih fokus untuk melakukan penjualan di dalam negeri dikarenakan kondisi cuaca yang kurang baik mempengaruhi kebutuhan CPO di dalam negeri yang cukup besar dan itu mempengaruhi harga pasar penjualan CPO di dalam negeri ke harga yang lebih baik dibandingkan dijual ke luar negeri.

Daftar Pustaka

- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: 5th edition*. United Kingdom: Routledge.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryadi, S. (2014). *Ekonomi, Bisnis, Regulasi, & Kebijakan Telekomunikasi: Catatan Kuliah*. Bandung: Telecommunication Engineering Institut Teknologi Bandung.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi. Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi. Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdak arya Offset.
- Salvatore, D. (2007). *International Economics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business (6th edition)*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Wahab, A., & Solichin. (2012). *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.